

## **SINERGITAS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN PEKALONGAN**

**Laila Fitria Nur Rahma<sup>1\*</sup>, Ahmad Anas<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

\*Corresponding Author: [lailafitrianurrahma@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:lailafitrianurrahma@mhs.uingusdur.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sinergitas antara pengembangan infrastruktur jalan dan program Badan Usaha Milik Desa dalam pembangunan ekonomi lokal masyarakat muslim di Desa Menjangan, Kabupaten Pekalongan. Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik, penelitian ini menggunakan observasi lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kondisi infrastruktur jalan di Desa Menjangan kurang baik dan Badan Usaha Milik Desa mengalami vakum karena kendala kepengurusan, namun, sinergi antara kedua faktor tersebut memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha dan perekonomian desa. Hal demikian dapat dilihat dari pengembangan infrastruktur jalan yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas ke pasar dan sumber daya, sedangkan Badan Usaha Milik Desa yang berfungsi dengan baik dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui inisiatif-usaha lokal yang berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi paradigmatik bagi pembuat kebijakan dalam merencanakan strategi yang efektif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan infrastruktur jalan di tingkat Desa

**Kata Kunci :** Infrastruktur Jalan, Badan Usaha Milik Desa, Ekonomi, Menjangan

### **ABSTRACT**

*This study aims to describe the synergy between road infrastructure development and the Village-Owned Enterprise program in the local economic development of the Muslim community in Menjangan Village, Pekalongan Regency. Using a qualitative research method with a descriptive analytical approach, this study employs field observations and interviews. The results of the study indicate that despite the poor condition of road infrastructure in Menjangan Village and the Village-Owned Enterprise experiencing a vacuum due to management constraints, the synergy between these two factors has the potential to create a conducive environment for business development and the village economy. This can be seen from the fact that improved road infrastructure can enhance access to markets and resources, while a well-functioning Village-Owned Enterprise can drive local economic development through sustainable local business initiatives. This study provides a paradigmatic contribution to policymakers in planning effective strategies to accelerate economic growth and reduce infrastructure gaps at the village level.*

**Keywords:** Road Infrastructure, Village-Owned Enterprises, Economy, Menjangan

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah sebuah keharusan bagi negara untuk memperbaiki kualitas dan kesejahteraan rakyatnya. Tujuan utama negara adalah mewujudkan stabilitas ekonomi, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) dan tingkat pengangguran yang rendah. Untuk menggapai tujuan tersebut, pemerintah membutuhkan berbagai elemen pendukung, dan salah satu yang paling krusial adalah infrastruktur yang kokoh. Peningkatan ekonomi merupakan kebutuhan penting bagi setiap negara dalam upaya meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakatnya (Fikriah & Wulandari, 2012).

Di era globalisasi yang kian berkembang, pembangunan infrastruktur memegang peranan krusial dalam menggerakkan roda ekonomi suatu wilayah terutama dalam hal distribusi barang dan jasa (Maqin, 2011). Hal ini juga berlaku untuk desa-desa di Indonesia, dimana pengembangan infrastruktur jalan memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, serta menghubungkan desa-desa tersebut dengan pasar-pasar utama. Desa yang menjadi konsentrasi dalam penelitian ini adalah Desa Menjangan, yang terletak di Kecamatan Bojong, Pekalongan. Pada dasarnya, Desa Menjangan memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Namun hal tersebut masih menghadapi tantangan dalam pembangunan infrastruktur jalan yang memadai. Keterbatasan aksesibilitas ini menjadi salah satu hambatan utama bagi pengembangan ekonomi lokal di wilayah tersebut. Di samping itu, program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang telah diinisiasi juga belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan infrastruktur jalan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan dua aspek penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. Dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, sinergi antara pengembangan infrastruktur jalan dan program BUMDes menjadi perhatian utama untuk membangkitkan peluang ekonomi yang ada di desa tersebut.

Berdasarkan data terakhir yang dihimpun dari <https://jdih.pekalongankab.go.id/>, tahun 2022 menurut kondisi fisiknya, panjang jalan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022 yaitu 432,632 km dalam kondisi baik, 135,383 km kondisi sedang atau sebesar 81,39% naik di bandingkan tahun 2021 dengan panjang jalan yang baik sebesar 414,211 km dan jalan sedang sebesar 137,054 km atau sebesar 78,99% dari jumlah total seluruh panjang jalan sebesar 697.896 km. Jadi, terdapat sekitar 18,61% kondisi jalan yang tidak baik di Kabupaten Pekalongan. Hal ini membuktikan bahwa sisa jalan di Kabupaten Pekalongan masih dalam kondisi tidak baik atau rusak. Yanti, dkk (2019), Maryaningsih, dkk (2014), serta Nuritasi (2013) berpendapat bahwa peningkatan infrastruktur jalan akan merangsang pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan penelitian (Nairobi & Respitasari, 2021) yang menyebutkan bahwa infrastruktur jalan memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Penting untuk memprioritaskan dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada agar manfaatnya dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Lebih lanjut pada penelitian (Cornelius & Primandhana, 2022) menyatakan variabel Infrastruktur Jalan memperlihatkan pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap PDRB di Kota Surabaya. Alhasil menunjukkan bahwa

infrastruktur merupakan topik yang menarik untuk dijadikan objek penelitian dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan infrastruktur jalan merupakan fondasi yang vital dalam mendukung konektivitas dan mobilitas di wilayah pedesaan. Ketersediaan akses yang lancar dan terhubung dengan baik menjadi kunci untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, seperti pertanian, industri kecil, dan pariwisata. Di samping itu, program BUMDes merupakan instrumen penting dalam memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat desa dengan memberikan akses kepada mereka untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya lokal secara mandiri. Ramadana, Ribawanto and Suwondo (2013) pada penelitiannya menunjukkan bahwa BUMDes telah memenuhi regulasi daerah Kabupaten Malang dan dikelola oleh desa melalui peraturan desa yang berkaitan dengan badan usaha milik desa. Namun, saat ini seluruh bidang usaha dalam badan usaha milik desa tidak aktif dan tidak mampu memberikan kontribusi pemasukan bagi desa. Oleh karena itu, eksistensi badan usaha milik desa ini hanya sebatas formalitas administratif belaka. Ridlwan (2015), menyatakan urgensi BUMDes dalam pembangunan perekonomian desa adalah untuk mengaktifkan dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Meskipun awalnya hanya menjadi formalitas administratif, BUMDes berpotensi besar sebagai motor penggerak ekonomi lokal jika dikelola dengan baik. Dengan memanfaatkannya secara efektif, desa dapat mengembangkan usaha sesuai dengan keperluan dan potensi lokal, yang dapat meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya ekonomi luar. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah desa dan pihak terkait untuk mengambil tindakan strategis dalam memperkuat peran dan fungsi BUMDes.

Banyak penelitian telah mengulas tentang dampak pembangunan infrastruktur jalan atau program BUMDes terhadap pertumbuhan ekonomi desa secara terpisah, namun masih minimnya kajian yang secara spesifik menggali sinergi di antara keduanya dalam konteks pengembangan ekonomi lokal di desa-desa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kekosongan literatur tersebut dengan menganalisis sinergi antara pengembangan infrastruktur jalan dan program BUMDes dalam merangsang pertumbuhan ekonomi lokal di Desa Menjangan. Melalui pendekatan analitis yang komprehensif, kami akan menyelidiki bagaimana peningkatan infrastruktur jalan telah memengaruhi aktivitas ekonomi di desa ini, serta bagaimana program BUMDes telah berperan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan, peluang, dan strategi yang relevan dalam upaya meningkatkan sinergi antara dua aspek tersebut guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Desa Menjangan. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai interaksi kedua faktor dapat berperan secara efisien.

Penelitian ini didorong oleh keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan memahami hubungan antara pembangunan infrastruktur jalan dan program BUMDes, diharapkan dapat dikembangkan strategi yang efektif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Penelitian dilakukan untuk

menemukan hal-hal yang berpengaruh terhadap kedua faktor ini, serta mengeksplorasi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di Desa Menjangan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuatan kebijakan yang lebih efektif dalam pengembangan infrastruktur dan program BUMDes di tingkat desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metodologi deskriptif analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data penelitian secara komprehensif dan mendalam. Metode deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan data berupa narasi, gambar, atau bentuk lain yang bersifat deskriptif. Tujuan utama metode ini adalah untuk mendalami pemahaman dan analisis suatu fenomena, mengembangkan teori baru, serta memberikan gambaran yang jelas tentang suatu gejala dengan interpretasi yang akurat (Moloeng., 2015).

Jenis sumber data primer penelitian ini meliputi wawancara dengan beberapa masyarakat desa Menjangan, termasuk pelaku usaha, petani, dan tokoh masyarakat, dan observasi langsung di lokasi penelitian untuk memantau kondisi infrastruktur jalan dan kegiatan BUMDes. Kemudian data sekunder diperoleh dari data desa seperti profil desa, RPJMDes, dan data statistik desa, dan berbagai literatur ilmiah, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan model Miles dan Huberman. Model ini terdiri dari empat tahapan yang mencakup. Dengan menggunakan model Miles dan Huberman, penelitian kualitatif dapat dilakukan secara sistematis mulai dari reduksi data untuk fokus pada informasi kunci, penyusunan data dalam format yang mudah dipahami, analisis mendalam untuk memahami pola dan tema, hingga verifikasi data untuk memastikan keabsahan temuan. Model ini membantu peneliti dalam mengembangkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap fenomena yang sedang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Desa Menjangan**

Desa Menjangan merupakan salah satu desa di Kabupaten Pekalongan yang terletak di bagian selatan Kecamatan Bojong. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar 137,623 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 4.320 orang. Lokasinya berbatasan langsung dengan Desa Sampih, yang merupakan bagian dari Kecamatan Wonopringgo. Desa Menjangan merupakan wilayah paling selatan di Kecamatan Bojong. Adapun secara geografis, Desa Menjangan berada di antara perbatasan Desa Kemas di sebelah utara, Desa Sampih di sebelah selatan, Desa Ketitang di sebelah barat, dan Desa Wonorejo di sebelah timur.

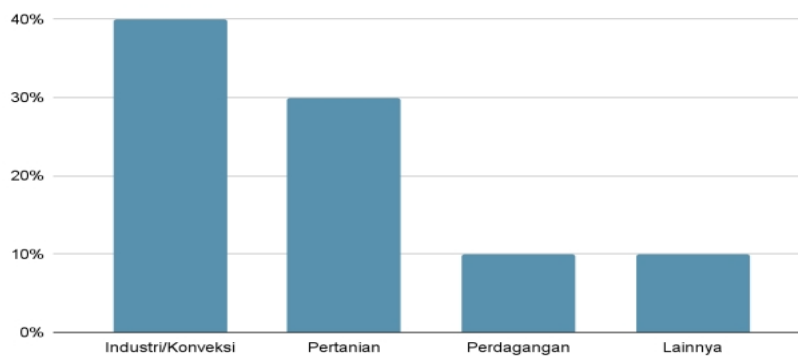


**Gambar 1 Peta Desa Menjangan**

Sumber: Data Pemerintah Desa Menjangan Tahun 2020-2023

Secara keseluruhan, Desa Menjangan terbagi menjadi empat wilayah administratif yang disebut RW, dan dibagi lagi menjadi 12 bagian kecil yang disebut RT. Berdasarkan hasil analisis, Desa Menjangan di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dikategorikan sebagai desa terbesar. Hal ini dikarenakan jumlah penduduknya yang lebih dari 4000 jiwa dan luas wilayahnya yang mencapai lebih dari 100 km<sup>2</sup>. Penduduk Desa Menjangan yang terbagi dalam 4 dusun, mayoritas bekerja di bidang industri, seperti konveksi rumahan, dan sebagian lainnya berprofesi sebagai petani.

### Potensi dan Tantangan Ekonomi Desa Menjangan



**Gambar 2 Bidang Mata Pencaharian Penduduk Desa Menjangan**

Sumber: Kasi Pemerintahan Umum Desa Menjangan, 2022

Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa Desa Menjangan memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan, dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor industri, khususnya konveksi rumahan, sektor pertanian, dan perdagangan. Diversifikasi ekonomi ini menunjukkan ketahanan ekonomi desa dan membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut.

Pada bidang industri, konveksi rumahan menjadi identitas yang khas dan telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Potensi sektor ini dapat ditingkatkan

dengan meningkatkan ketrampilan para pengrajin atau memperluas akses pasar. Pertanian juga menjadi sektor penting dalam memenuhi kebutuhan pangan lokal dan meningkatkan ketahanan pangan desa. Jenis tanaman dan sistem pertanian perlu dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Sedangkan dalam bidang perdagangan berperan dalam distribusi produk dan jasa di desa yang membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan. Hal tersebut perlu difokuskan pada perluasan jenis usaha dan jangkauan perdagangannya untuk meningkatkan nilai ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM. Namun, beberapa hal itu tentunya menghadapi beberapa tantangan dalam mengembangkan ekonominya, seperti: Keterbatasan infrastruktur jalan, jembatan, dan jaringan telekomunikasi yang belum memadai dapat menghambat kelancaran kegiatan ekonomi. Kurangnya akses terhadap modal dan teknologi dapat menghambat pengembangan usaha kecil dan menengah. Sumber daya manusia yang kurang kompeten. Keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, peran desa menjadi sangat krusial. Desa memiliki peran sebagai unit dasar dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola wilayahnya. Di sisi lain, desa memiliki hak untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan kelurahan. Hal ini menunjukkan peran penting desa dalam mendukung pemerintah daerah dalam proses pembangunan, terutama dalam meningkatkan kemajuan ekonomi, dalam sistem politik Indonesia.

Pemerintah memberikan perhatian pada pembangunan di wilayah pedesaan dengan menyediakan anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun untuk desa. Perencanaan pengelolaan dana desa dimulai dengan penyusunan RPJMDes (Rencana Panjang Jangka Menengah Desa) untuk 6 tahun ke depan. RPJMDes ini memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan desa, kebijakan umum, OPD, lintas OPD, proyek prioritas desa, dan rencana kerja. Pemerintah desa diwajibkan menyelenggarakan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) secara partisipatif untuk menyusun RPJMDes. Hal ini penting karena partisipasi masyarakat merupakan komponen vital dalam pengambilan keputusan di setiap program pembangunan. Musrenbangdes melibatkan berbagai pihak, seperti: BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kelompok Tani, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), dan Karang Taruna. Musrenbangdes ini akan menghasilkan kesepakatan tentang prioritas pembangunan desa yang akan dibiayai dengan dana desa.

Berdasarkan hasil Musrenbangdes Menjangan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Maret 2020 bertempat di Balai Desa dalam rangka membahas rancangan RPJMDes tahun 2020-2025, dihasilkan rumusan arah kebijakan pembangunan desa. Dimana hal tersebut memuat program dari visi misi kepala desa. Salah satu rencana prioritas yang akan dilaksanakan dan menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu penyediaan sarana dan prasana (termasuk infrastruktur jalan) dan bidang pemberdayaan masyarakat (koperasi,

UMKM, pengembangan dan promosi hasil unggulan desa serta pengelolaannya). Termasuk juga pada bidang dukungan penanaman modal yang menekankan pada pengelolaan BUMDes.

### Peran Infrastruktur Jalan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Agenda prioritas pertama mengenai masalah infrastruktur jalan. Simon Kuznet menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur adalah *public service obligation* yang menjadi kewajiban pemerintah karena merupakan prasarana publik utama yang mendukung aktivitas ekonomi dan menentukan efisiensi dan efektivitasnya serta penting untuk kelancaran perekonomian (Maqin, 2011). Ketertinggalan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat disebabkan oleh kurangnya daya tarik daerah tersebut dan keterbatasan sumber daya karena infrastruktur yang terbatas. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat aktivitas ekonomi. Menanggapi hal tersebut, pemerintah perlu mengambil kebijakan publik. *Essensi* kebijakan publik adalah tanggapan dari pemerintah atau lembaga pemerintahan terhadap permintaan atau dukungan masyarakat untuk meningkatkan kehormatan dan kesejahteraan warganya. Seperti yang dikemukakan oleh Dye Thomas R., (1976:1), "*Public policy is whatever governments chose to do or not to do*".

Menelisik data RPJM Desa Menjangan tahun 2020-2025, kondisi infrastruktur desa terinci dalam tabel berikut.

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Rusak	Baik	
1	Jalan Desa			
	Aspal	0,6 km	4,8 km	5,4 km
	Makadam	1,8 km	-	1,8 km
	Tanah			
2	Jalan Antar Desa			
	Aspal			
	Makadam			
	Tanah			

**Gambar 3 Kondisi Infrastruktur**

Sumber: Profil Desa Tahun 2019

Meskipun data terakhir yang dimiliki (2019) mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini, namun informasi mengenai kondisi aspal rusak sepanjang 0,6 km dari total panjang jalan sebesar 5,4 km tetap memberikan gambaran tentang kondisi infrastruktur jalan pada waktu itu. Meskipun tidak sepenuhnya mutakhir, data tersebut masih dapat menjadi acuan awal untuk mengevaluasi tingkat keausan atau kerusakan jalan serta untuk merencanakan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, didapatkan pernyataan bahwa jalan di Desa Menjangan saat ini jauh dari kata baik. Kerusakan jalan terlihat jelas di berbagai titik, dengan lubang dan gelombang yang menghiasi permukaannya. Keadaan ini semakin diperparah saat musim hujan tiba. Genangan air muncul di beberapa titik jalan yang rusak, tak jarang tersembunyi di balik lubang dan kerusakan lainnya, siap menjebak pengguna

jalan yang tidak waspada. Kondisi ini tentu saja membahayakan dan membuat pengemudi, baik motor maupun mobil, harus ekstra hati-hati saat melintas. Kecepatan kendaraan pun harus dikurangi drastis untuk menghindari kecelakaan. Tak jarang, genangan air yang dalam dan tak terlihat ini menyebabkan kendaraan terperosok dan mogok, menambah kesemrawutan di jalan.

Kondisi jalan yang rusak parah di Desa Menjangan telah menjadi keluhan utama dari para pelaku ekonomi, termasuk pedagang, petani, dan industri. Kerusakan jalan di beberapa area desa ini mengakibatkan terhambatnya pergerakan barang dan jasa, meningkatnya biaya transportasi, dan bahkan risiko kecelakaan. Dampaknya meliputi kerugian finansial, penurunan pendapatan usaha, serta gangguan pada aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Melalui wawancara dengan masyarakat, terutama para pelaku ekonomi, mereka menegaskan pentingnya pemerintah desa segera mengambil langkah perbaikan. Mereka berharap jalan rusak dapat segera diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya, agar aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari dapat berjalan lancar dan aman. Perbaikan infrastruktur jalan yang baik adalah langkah krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Menjangan. Pemerintah desa perlu merespon keluhan masyarakat dengan serius dan segera bertindak untuk memperbaiki kondisi infrastruktur jalan. Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan meningkatkan daya saing ekonomi di Desa Menjangan. Berikut dokumentasi yang diambil beberapa waktu lalu yang menunjukkan kondisi infrastruktur jalan Desa Menjangan di sejumlah titik tertentu.



Gambar 4 Kondisi Infrastruktur Jalan RT. 07/ RW. 03

Sumber: Dokumentasi (Data Primer)



Gambar 5 Kondisi Infrastruktur Jalan RT. 10/ RW. 04  
Sumber: Dokumentasi (Data Primer)

Melihat kondisi ini, perbaikan jalan di Desa Menjangan sudah menjadi kebutuhan mendesak. Perbaikan jalan tak hanya akan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga memperlancar arus transportasi dan roda ekonomi di desa. Selain perbaikan jalan, pemasangan rambu-rambu peringatan di area genangan air juga perlu dilakukan. Hal ini untuk membantu pengguna jalan agar lebih berhati-hati dan menghindari potensi kecelakaan. Koordinasi dengan pihak terkait untuk pemeliharaan jalan desa secara berkala juga tak kalah penting agar kondisi jalan di Desa Menjangan dapat terus terjaga dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Faktanya, pada saat melakukan wawancara dengan pemerintah desa, pihaknya menuturkan bahwasannya pada RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) atau perencanaan pembangunan untuk satu periode (1 tahun), terdapat beberapa rencana kerja mengenai perbaikan sarana dan prasarana. Diantaranya yaitu pengaspalan jalan (sekitar Balai Desa, RT 09/ RW 03, dan RT 10/ RW 04), pemasangan cermin cembung, pemasangan JPU, dan pembangunan penampungan bak sampah. Namun, perkiraan pelaksanaan untuk bulan Maret sendiri yakni pengaspalan jalan di RT 09/ RW 03 belum dikonfirmasi sampai sekarang. Lebih lanjut, harapannya adalah agar pelaksanaan rencana kerja perbaikan sarana dan prasarana dalam RKPDes dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Sebab hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan kepada masyarakat Desa Menjangan.

### **Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal**

Kembali pada rencana prioritas kedua yang juga menjadi fokus pada penelitian ini yaitu tentang bidang pemberdayaan masyarakat melalui dukungan penanaman modal yang menekankan pada pengelolaan BUMDes. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan

badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan aset desa, pengembangan usaha ekonomi desa, dan pelayanan umum (Ramadana et al., 2013).

Berdasarkan panduan pengelolaan BUMDes yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya tahun 2007, berikut adalah tujuan pendirian BUMDes: Meningkatkan perekonomian desa. Meningkatkan pendapatan asli desa. Meningkatkan pengolahan potensi desa. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Sedangkan dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tujuan utama pembentukan BUMDes adalah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Peraturan tersebut menegaskan bahwa BUMDes didirikan dengan maksud untuk meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah desa dalam menjalankan tugas pemerintahan serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi di pedesaan. Pembentukan BUMDes disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi yang ada di desa.

BUMDes diharapkan akan menjadi motor penggerak ekonomi di pedesaan, dengan mengelola aset ekonomi desa secara kolektif oleh masyarakat. Prinsip dan esensi BUMDes harus diperkuat oleh semangat gotong royong dan swadaya sebagai upaya untuk memperkuat dimensi ekonomi kelembagaannya. Pada fase ini, BUMDes akan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan memajukan aktivitas ekonomi masyarakat, di mana BUMDes berfungsi sebagai entitas utama yang mengkoordinasikan upaya tersebut. Hal ini juga penting dalam rangka mengurangi praktik free-rider yang dapat meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Nurcholis (2011, h. 88).



Gambar 6 Kedudukan BUMDes Dalam Menggerakkan Ekonomi Produktif Desa  
Sumber: Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 2019

Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menggerakkan ekonomi produktif di desa seharusnya menjadi sinergi yang erat dengan pemerintah dalam upaya

memajukan BUMDes. Sinergi ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi BUMDes dalam menjalankan perannya sebagai motor penggerak ekonomi produktif di tingkat desa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan dukungan kebijakan dan regulasi, pemberian sumber daya dan akses keuangan, pemberdayaan melalui pelatihan dan pendampingan, koordinasi dan kolaborasi, monitoring dan evaluasi. Namun, hal-hal tersebut nampaknya belum terealisasi di Desa Menjangan. Terhambatnya BUMDes di Desa Menjangan, seperti yang disampaikan Pak Taufik Akbar selaku sekretaris desa, merupakan sebuah kemunduran bagi ekonomi pedesaan. BUMDes yang seharusnya menjadi motor penggerak roda ekonomi desa kini terhenti karena terkendala aspek kepengurusannya. Hal ini tentunya akan membawa dampak negatif tersendiri bagi desa dan sudah semestinya masalah ini harus diatasi dengan cepat. Adapun hal-hal tersebut dijelaskan sebagai berikut.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kondisi infrastruktur jalan di Desa Menjangan kurang baik dan Badan Usaha Milik Desa mengalami vakum karena kendala kepengurusan, namun, sinergi antara kedua faktor tersebut memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha dan perekonomian di tingkat desa. Hal demikian dapat dilihat pada pengembangan infrastruktur jalan yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas ke pasar dan sumber daya. Sedangkan program Badan Usaha Milik Desa yang berfungsi dengan baik dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui inisiatif-usaha lokal yang berkelanjutan.

Penelitian ini berkontribusi dalam memebrikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam merencanakan strategi yang efektif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pembangunan di Desa. Dengan memperhatikan interaksi antara infrastruktur jalan dan program Badan Usaha Milik Desa, langkah-langkah dapat diambil untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Penting penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi hambatan sosiologis dalam sinergitas pengembangan infrastruktur jalan dan pembangunan ekonomi di Desa Menjangan, kabupaten Pekalongan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bradshaw, T. K., & Blakely, E. J. (1999). What are "third-wave" state economic development efforts? From incentives to industrial policy. *Economic Development Quarterly*, 13(3), 229-244.
- Cornelius, D., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis pengaruh infrastruktur jalan, listrik dan air terhadap produk domestik regional bruto. *Kinerja*, 19(2), 338-344. <https://doi.org/10.30872/jkin.v19i2.10923>
- Engle, M. (1999). *Qualitative Data Analysis: An expanded Sourcebook* (2nd Ed.) Matthew B. Miles and A. Michael Huberman. Thousand Oaks, CA: Sage publications, 1994, 336 pp.
- The American Journal of Evaluation*, 20(1). [https://doi.org/10.1016/s1098-2140\(99\)80125-8](https://doi.org/10.1016/s1098-2140(99)80125-8)

- Fikriah, & Wulandari, M. (2012). Analisis Pengaruh Investasi Infrastruktur Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 19.
- Fox, W. F., & Porca, S. (2001). Investing in rural infrastructure. *International Regional Science Review*, 24(1). <https://doi.org/10.1177/016001701761012971>
- Gibbons, S., Lyytikäinen, T., Overman, H. G., & Sanchis-Guarner, R. (2019). New road infrastructure: The effects on firms. *Journal of Urban Economics*, 110(March 2017), 35–50. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2019.01.002>
- Hadi, P. L., Wasanta, T., & Santosa, W. (2021). PENGARUH INDEKS INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP INDIKATOR EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal HPJI*, 7(2). <https://doi.org/10.26593/jhpji.v7i2.5058.143-152>
- Hanif, N. (2011). Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta: erlangga.
- Karim, A. (2019). Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Nas Media Pustaka. Retrieved from <https://www.academia.edu/download/62440051/EBOOK-BUMDes20200322-77446-186t2rg.pdf>
- Maqin, A. (2011). Pengaruh Kondisi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat. *Trikonomika*, 10(1), 10–18.
- Maryaningsih, N., Hermansyah, O., & Savitri, M. (2014). PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 17(1). <https://doi.org/10.21098/bemp.v17i1.44>
- Moloeng, L. J. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja rosda karya. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nanga, Muana. 2005. Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Nairobi, N., & Respitasari, R. (2021). Public Infrastructure and Economic Growth in the Local Region. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(1), 51–60. <https://doi.org/10.29259/jep.v19i1.13826>
- NSS, R. L. P., Suryawardana, E., & Triyani, D. (2015). ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA EKONOMI RAKYAT DI KOTA SEMARANG. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(1). <https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.505>
- Nuritasi, F. (2013). Pengaruh Infrastruktur, PMDN Dan PMA Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4).
- Raitzer, D. A., Blondal, N., & Sibal, J. (2019). tions : A review of the evidence. Impact evaluations of energy interven
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(6), 1068–1076. Retrieved from [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=190372&val=6469&title=Keberadaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES sebagai Penguatan Ekonomi Desa](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=190372&val=6469&title=Keberadaan%20Badan%20Usaha%20Milik%20Desa%20BUMDES%20sebagai%20Penguatan%20Ekonomi%20Desa)

- Ridlwan, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424-440. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>
- Sasmito, C. (2017). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* ISSN. 2442-6962 Vol. 6, No. 3 (2017) *IMPLEMENTASI*, 6(3), 72. Retrieved from [www.publikasi.unitri.ac.id](http://www.publikasi.unitri.ac.id)
- Suryana, M. S. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*.
- Winarti, E. (2013). Pengaruh Motivasi Konsumen, Persepsi Kualitas, Sikap Konsumen dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Mobil Nissan Grand Livina di Dealer Pusat PT Nissan Motor Indonesia JL. Mt Haryono KAV. 10 Jakarta Timur. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Yanti, M., Naidah, & Badollahi, I. (2019). Pengaruh Infrastruktur Jalan , Listrik Dan Air Terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Di. *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1).